

Lampiran I. SK Inspektur Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 188/19/Inspektorat/2018
Tanggal : 30 Mei 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

JABATAN : Inspektur

TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan umum khususnya perumusan kebijaksanaan dan pembinaan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan seluruh urusan bidang pemerintahan di daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

FUNGSI :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan.
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	➤ IKU Kualitas Evaluasi SAKIP, dimaksud adalah memberikan jaminan kualitas terhadap pelaksanaan SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. ➤ Bahwa hingga tahun 2017, belum semua SKPD yang melaksanakan SAKIP sesuai ketentuan, selain itu menjadi amanat Perda No 2 tahun 2018 tentang RPJMD, IKU Pemkab No 16 tentang Opini BPK. ➤ Formulasinya: Realisasi Perolehan Nilai Bobot yang Diberikan Oleh Evaluator dibagi Target Nilai Bobot Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Pemkab. Batola X 100 % ➤ Nilai Bobot Hasil Evaluasi atas LKIP Pemkab. Barito Kuala untuk unsur Evaluasi Intern yang diberikan oleh Instansi Berwenang (Kemen PAN-RB/BPKP/Itprop) selaku evaluator di bagi dengan Target Nilai Bobot.	Inspektur Daerah	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemkab. Batola dari instansi berwenang.
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Persentase SKPD yang Penyusunan Laporan Keuangannya Telah Sesuai SAP	➤ IKU Laporan Keuangan sesuai SAP, dimaksud adalah memberikan jaminan bahwa kualitas Laporan Keuangan SKPD, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan SAP, sehingga akuntabilitas laporan keuangan dapat diyakini keabsahannya. ➤ Hal ini menjadi amanah Perda RPJMD tahun 2017-2022, yang mendukung Opini BPK dan mempertahankan WTP. ➤ Formulasinya: Jumlah SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP, dibagi semua SKPD X 100 %	Inspektur Daerah	Laporan Keuangan SKPD lingkup Pemkab. Batola.

		Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Temuan Bernilai Material	➤ IKU berkenaan dengan temuan bernilai material ini dimaksudkan, sebagai penjabaran atas Tupoksi Inspektorat, agar temuan yang bernilai material dapat diminimalisir. ➤ Bahwa hingga tahun 2017, masih ditemukan hasil pemeriksaan adanya penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan SAP, kekurangan volume yang berdampak pada kerugian material. ➤ Formulasinya: Temuan pemeriksaan yang tidak bernilai material, dibagi dengan semua SKPD yang diperiksa X 100 %.	Inspektur Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI
3.	Meningkatnya Maturitas SPIP Pemkab. Barito Kuala	Level Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	➤ IKU ini memberikan korelasi terhadap pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019 yang menekankan bahwa tahun 2019 semua Kabupaten Maturitas SPIP Level III. ➤ Dengan demikian Inspektorat selaku SKPD yang berwenang untuk mengawal upaya Tingkat Maturitas dimaksud menjadi sangat penting dan mendasar. ➤ Formulasinya: Nilai yang Diberi Oleh BPKP atas Evaluasi maturitas SPIP Pemkab. Batola di bagi dengan target yang ditetapkan dalam Renstra X 100 %.	Inspsektur Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Pemkab. Batola dari BPKP.
4.	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP Level	➤ IKU ini menjadi bagian yang sangat penting, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas APIP, tuntutan kemajuan teknologi, dan dinamika perubahan yang cepat, sehingga Kapabilitas APIP harus ditingkatkan. ➤ Formulasinya: Jumlah APIP yang bersertifiktas Diklat Substantif dibagi jumlah semua APIP X 100 %.	Inspektur Daerah	Laporan Hasil Evaluasi atas Tingkat Kapabililas APIP Inspektorat Kab. Batola dari BPKP.

INSPEKTUR,

Drs. JOHAN ARIFIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19581209199103 1 002